

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARATDita Farida¹, Tri Kunawangsih²

Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

ditafraida30@gmail.com, trikunawangsih@trisakti.ac.id**Abstract**

This study aims to analyze the effect of government spending, regional levies, and regional taxes on economic growth in West Java Province in 2019-2023. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The method used in this study is a quantitative method with a panel data approach, which combines time series data for five years and cross-section data from 27 districts/cities in West Java. The analysis model used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach which is selected based on the Chow test and the Hausman test. The results of the study indicate that regional taxes have a positive and significant effect on economic growth, while regional levies have a negative and significant effect. On the other hand, government spending does not show a significant effect on regional economic growth. These findings indicate the need to optimize the management of levies and increase the efficiency of government spending allocation to encourage sustainable economic growth.

Keywords: *economic growth, government spending, regional levies, regional taxes, panel data.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, retribusi daerah, dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan data panel, yang menggabungkan data time series selama lima tahun dan data cross section dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan retribusi dan peningkatan efisiensi alokasi pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, retribusi daerah, pajak daerah, data panel.

1. Pendahuluan

Perekonomian yang baik adalah sasaran penting bagi setiap wilayah, termasuk Provinsi Jawa Barat. Jika perekonomian Provinsi Jawa Barat berkembang dengan baik dan berkelanjutan, hal ini bisa membawa efek positif seperti menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2023 LPE Provinsi Jawa Barat sudah tercapai dengan mencatat sebesar 5,00% (y-on-y), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 kemudian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%, sedikit lebih melambat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan ditahun 2024 LPE Jawa Barat belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) 2024, yaitu sebesar 5,67% sehingga terdapat selisih sebesar 0,72%. (Bappenda Jabarprov)

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (Dalam persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	5.82	-2.39	3.55	5.25	4.96
Jawa Barat	5.02	-2.52	3.74	5.45	5.00
Banten	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.81
Jawa Tengah	5.36	-2.65	3.33	5.31	4.98
DI Yogyakarta	6.59	-2.67	5.58	5.15	5.07
Jawa Timur	5.53	-2.33	3.56	5.34	4.95

Sumber: Simreg bappenas

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,2% Namun, Provinsi Jawa Barat menunjukkan pemulihan yang cukup baik pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,74% dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 5,45% pada tahun 2022 dan 5,00% pada tahun 2023.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan

Teori Solow telah berkembang menjadi teori pertumbuhan yang berasal dari dalam, yang menyatakan bahwa pertumbuhan berasal dari akumulasi modal. Modal di

sini mencakup tidak hanya unsur fisik tetapi juga unsur non-fisik seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Inovasi teknologi ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses di mana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi suatu komunitas mengalami peningkatan.

Teori Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 yang mengubah untuk ketiga kalinya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai aturan umum dan prosedur perpajakan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh orang atau organisasi kepada negara. Pembayaran ini bersifat wajib menurut hukum, tanpa imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara memiliki banyak peran dalam ekonomi makro: mereka berfungsi untuk membiayai pengeluaran serta kegiatan pemerintah dan juga mengatur keadaan perekonomian. Untuk memperbesar penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengakses sumber dana yang sesuai dengan kapabilitas dan kondisi mereka masing-masing.

Pengeluaran Pemerintah

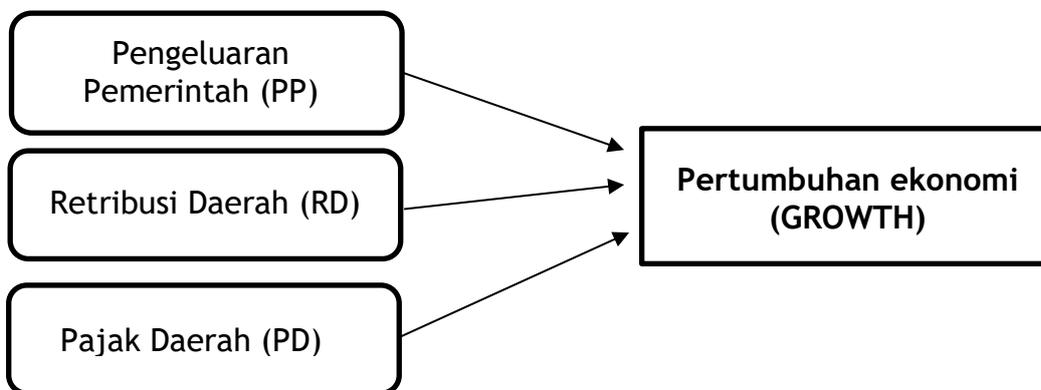
Keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam memanfaatkan uang mereka memiliki dampak besar terhadap total pendapatan ekonomi dalam waktu dekat. Peningkatan pengeluaran yang direncanakan akan membuat permintaan agregat naik. Sebagai akibatnya, produksi barang dan jasa juga akan bertambah karena meningkatnya permintaan agregat. (Mankiw dalam Ardiyanto 2012). Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sukirno dalam Sitaniapessy 2013). Ketika ekonomi dikelola sepenuhnya oleh pasar bebas, masih ada kebutuhan akan peran atau intervensi pemerintah. Tanpa itu, ekonomi mungkin tidak mencapai tingkat pekerjaan yang penuh, dan aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan stabil

Retribusi Daerah

Wilayah kabupaten atau kota berupaya untuk memperbaiki dan menyebarkan kesejahteraan masyarakat. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan retribusi daerah sebagai salah satu sumber dana untuk menjalankan pemerintahan dan pengembangan daerah. Setelah mengikuti standar yang ditentukan, mereka bisa menentukan berbagai jenis retribusi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Firdausy, 2017).

Retribusi daerah, menurut Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2000, didefinisikan sebagai pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai Pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah demi kebutuhan pribadi atau badan. Jadi, saat seseorang ingin mendapatkan layanan dari pemerintah daerah, mereka harus membayar biaya yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Retribusi daerah adalah jumlah uang yang harus disetorkan oleh pribadi atau badan untuk layanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk keuntungan mereka.

Kerangka Konseptual



3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan atau menjabarkan data penelitian yang telah dikumpulkan.

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode regresi data panel diaplikasikan, yang menggabungkan *cross-section* dan *time series*. Metode ini dipilih karena data yang dianalisis mencakup 5 tahun pada 27 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Populasi dan Sampel

Populasi

Total populasi pada penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota. Karena pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* maka seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 27 Kabupaten/Kota

Sampel

Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* digunakan karena jumlah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kriteria penelitian ini yaitu 27 Kabupaten/Kota

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Penentuan Jumlah Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki laporan realisasi anggaran (penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, pengeluaran pemerintah) serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode penelitian 2019-2023.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

	GROWTH	PP	RD	PD
Mean	0.062291	0.775964	0.038254	0.084526
Median	0.076800	0.057100	-0.019400	0.086900
Maximum	0.140900	13.97310	3.909400	0.838100
Minimum	-0.029400	-0.930700	-0.743600	-0.261800
Std. Dev.	0.037103	2.684111	0.452953	0.137962
Observations	135	135	135	135

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yaitu sebanyak 135. Jumlah tersebut dari 27 sampel dari penelitian ini. Dapat di ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai minimum sebesar -0.029400 dan nilai maximum sebesar 0.140900. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di kabupaten Indramayu yaitu tahun 2023, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di kabupaten Karawang tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Pengeluaran pemerintah mempunyai nilai minimum sebesar -0.930700 dan nilai maximum sebesar 13.97310. Pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di kabupaten Subang tahun 2019, sedangkan pengeluaran pemerintah terendah terjadi di kota Sukabumi tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa retribusi daerah mempunyai nilai minimum sebesar -0.743600 dan nilai maximum sebesar 3.909400. retribusi daerah tertinggi terjadi di kabupaten Sumedang tahun 2022 sedangkan retribusi daerah terendah terjadi di kabupaten Sumedang tahun 2023.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pajak daerah mempunyai nilai minimum sebesar -0.261800 dan nilai maximum sebesar 0.838100. retribusi daerah tertinggi terjadi di kabupaten Sumedang tahun 2022 sedangkan retribusi daerah terendah terjadi di kabupaten Sumedang tahun 2023.

Uji Chow

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	66.129836	(26,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	385.429428	26	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai *Statistic Section Chi-square* sebesar 385.429428 dengan nilai prob 0.0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) maka secara statistik H_1 diterima dan menolak H_0 . Sehingga dalam uji *Chow* ini, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Uji Hausman

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.695376	3	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Nilai distribusi *statistic Chi Square* berdasarkan tabel 4.3 adalah 46.695376 dengan nilai prob 0.0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) maka secara statistik H_1 diterima dan menolak H_0 . Sehingga dalam uji *Hausman* ini, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 4.4 Hasil U Regresi menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.044280	0.002196	20.16181	0.0000
PP	0.001212	0.000628	1.931823	0.0561
RD	-0.025299	0.004410	-5.737094	0.0000
PD	0.213399	0.026851	7.947662	0.0000
Effects Specification				
R-squared	0.997209	Mean dependent var	0.062291	
Adjusted R-squared	0.996438	S.D. dependent var	0.037103	
S.E. of regression	0.002214	Akaike info criterion	-9.194627	
Sum squared resid	0.000515	Schwarz criterion	-8.549011	
Log likelihood	650.6373	Hannan-Quinn criter.	-8.932267	
F-statistic	1293.719	Durbin-Watson stat	1.078539	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.997209
Adjusted R-squared	0.996438

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Diketahui nilai Adjusted R-squared sebesar 99,64 maka berkesimpulan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 99,64%. Sedangkan sisanya sebesar 00,36% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Tabel 4.6 Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

F-statistic	1293.719
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan *Eviews 9.0*

Nilai prob 0.000000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel pengeluaran pemerintah, retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

4.5.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Berdasarkan tabel 4.4 nilai prob pengeluaran pemerintah 0.0561 > 0,05 maka H_a ditolak dan H₀ diterima, yang artinya variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode 2019-2023

Berdasarkan tabel 4.4 nilai prob retribusi daerah 0.0000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tabel 4.4 nilai prob pajak daerah 0.0000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

4.5.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan tabel 4.4 dapat menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Growth}_{it} = 0.0442 + 0.0012\text{PP}_{it} - 0.0252\text{RD}_{it} + 0.2133\text{PD}_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 0.0442 mengartikan bahwa jika nilai variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, retribusi daerah dan pajak daerah naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.0442

2. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah (PP) sebesar 0.0012 menunjukkan jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel pengeluaran pemerintah meningkat maka nilai pertumbuhan ekonomi ikut meningkat sebesar 0.0012, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien variabel retribusi daerah (RD) bertanda negatif sebesar -0.0252 menunjukkan jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel retribusi daerah meningkat maka nilai pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar -0.0252.
4. Nilai koefisien variabel pajak daerah (PD) sebesar 0.2133 menunjukkan jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel pajak daerah meningkat maka nilai pertumbuhan ekonomi ikut meningkat sebesar 0.2133, begitu juga sebaliknya.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi yang melebihi batas $\alpha = 0.05$. Hasil ini diperkuat oleh studi sebelumnya, seperti pada penelitian oleh Koyongian, dkk (2019), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi

4.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lutfiona Riandhani dkk (2024) di Provinsi Aceh, Penurunan pertumbuhan ekonomi ini diduga disebabkan oleh penerimaan retribusi daerah yang memiliki nilai kontribusi yang sangat kecil kurang dari 10% terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan lebih kecil dibandingkan pajak daerah. (Badan Pusat Statistik)

4.6.3 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan dari pajak daerah dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Miswara (2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 sebagai berikut: 1. Pengeluaran Pemerintah (PP) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat 2. Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat 3. Pajak Daerah (PD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, E. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- [2] Alfirman, Luky, and Edy Sutriyono. "Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression." *Jurnal Keuangan Publik* 4.1 (2006): 25-66.
- [3] Aggoro, Damas Dwi. Pajak daerah dan retribusi daerah Universitas Brawijaya Press, 2017
- [4] Ardiyanto, D. "Analisa Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia." *Universitas Brawijaya* (2012).
- [5] Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat (Persen), 2019 -2023. <https://jabar.bps.go.id/>
- [6] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (4 April 2024). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2019-2023. <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/78c93d5ec1880f771d1102d1/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-barat-menurut-pengeluaran-provinsi-jawa-barat-2019-2023.html>
- [7] Ekonomi Jawa Barat Kuartal I/2025 https://jabarprov.go.id/berita/ekonomi-jawa-barat-kuartal-i-2025-tumbuh-4-98-persen-melebihi-angka-nasional-18815?utm_source
- [8] Ekonomi Tahun 2003-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 194-204.
- [9] Hanum, F. D., & Murtatik, S. (2022). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 941-950.
- [10] Ismail, Tjip. Potret pajak daerah di Indonesia. Kencana, 2018.
- [11] Indra Suhendra, S. E. Dimensi Modal Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Sebuah Potret Dari Indonesia. Media Sains Indonesia, 2021.
- [12] Jannata, A. H. (2022). Pengaruh pajak dan Retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar (Ekonomi Syariah, UIN).
- [13] Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2024 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional.html?utm_source
- [14] Koyongian, Christian Lendy, Paulus Kindangen, and G. M. Kawung. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19.4 (2019): 1-15.
- [15] Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DiAceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153-159.